

EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS USAHA POKLAHSAR DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN PANGKEP

EVALUATION OF PROGRAM FOR INCREASING POKLAHSAR BUSINESS CAPACITY  
IN IMPROVING INCOME OF COASTAL PEOPLE IN PANGKEP REGENCY

Risna Irawati<sup>1</sup>, Muh. Rauf<sup>2</sup> dan Syahrul Djafar<sup>3</sup>

1) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

2) dan 3) Dosen Program Studi Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan, Pascasarjana

Universitas Muslim Indonesia

irarisna78.ir@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Mengetahui faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan kelompok pengolah hasil perikanan di pesisir Kabupaten Pangkep. Mengetahui tingkat pendapatan usaha kelompok pengolah hasil perikanan baik yang sudah mendapatkan bantuan maupun yang belum mendapatkan bantuan dari Dirjen Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Bulan Maret 2018 di wilayah pesisir Kabupaten Pangkep. Pengumpulan data menggunakan analisis uji t yaitu uji komperatif. Hasil perhitungan analisis regresi berganda menunjukkan variabel peranan pemerintah memiliki t hitung  $2,278 > t$  tabel sebesar  $2,2015$  (sig.  $=0,05$  dan  $df = n-k$ , yaitu  $15-4=11$ ), koefisien beta unstandardized sebesar  $0,258$  dan tingkat signifikansi  $0,044 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan usaha kelompok pengolahan hasil perikanan. variabel ekonomi memiliki t hitung  $2,450 > t$  tabel sebesar  $2,2015$  (sig.  $=0,05$  dan  $df = n-k$ , yaitu  $15-4=11$ ) dengan koefisien beta unstandardized sebesar  $0,139$  dan tingkat signifikansi  $0,032$  yang lebih kecil dari  $0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan usaha kelompok pengolahan hasil perikanan. Sedangkan variabel sosial budaya memiliki t hitung sebesar  $-1,259 < t$  tabel sebesar  $2,2015$  (sig.  $=0,05$  dan  $df = n-k$ , yaitu  $15-4=11$ ) dengan koefisien beta unstandardized sebesar  $-0,167$  dan tingkat signifikansi  $-0,154$  yang lebih besar dari  $0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa sosial budaya tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha kelompok pengolahan hasil perikanan.

Kata Kunci : Masyarakat Pesisir, Program Bantuan dan Peningkatan Pendapatan

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that affect the income generation of processing group of fishery products in coastal Pangkep regency. Knowing the income level of the group of fishery producers who have received assistance or who have not received assistance from the Director General of Strengthening Maritime and Fishery Competitiveness in Pangkep Regency. This research was conducted in February until

March 2018 in coastal area of Pangkep Regency. Data collection using t test analysis is comparative test. The results of multiple regression analysis show that the role of government variable has t arithmetic  $2.278 > t$  table of 2.2015 (sig. = 0,05 and df = nk, that is  $15-4 = 11$ ), unstandardized beta coefficient of 0.258 and significance level of 0.044  $< 0.05$ . This shows that the role of government affects the income of fishery product processing business group. economic variable has t count  $2,450 > t$  table equal to 2,2015 (sig. = 0,05 and df = nk, that is  $15-4 = 11$ ) with unstandardized beta coefficient of 0,139 and level of significance 0,032 smaller than 0,05 . This shows that the economy affects the income of fishery product processing business group. While the socio-cultural variables have t arithmetic equal to  $-1.259 < t$  table of 2.2015 (sig. = 0,05 and df = nk, ie  $15-4 = 11$ ) with unstandardized beta coefficient of -0.167 and the significance level -0.154 greater than 0.05. This shows that social culture does not affect the income of fishery product processing business group.

Keywords : Coastal Communities, Assistance and Income Improvement Programs

## PENDAHULUAN

Perairan laut Indonesia mengandung sumberdaya hayati laut yang melimpah dan memiliki ekonomi sosial yang penting bagi pembangunan Indonesia, yaitu berupa sumber pangan lapangan kerja dan penghasil devisa. Pembangunan Indonesia di sektor perikanan ini mempunyai arti yang sangat penting dan berperan strategi dalam mewujudkan perikanan yang lebih maju, efisien dan tangguh dalam rangka mendukung transformasi struktur perekonomian nasional dan arahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (Dahuri, 2000).

Perkembangan kebijakan pembangunan telah mengarah pada upaya dan mewujudkan pemberdayaan daerah berupa penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah yang lebih

dikenal dengan otonomi daerah. Pengaturan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten dan kota diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Hal ini menandai perubahan pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik, dengan memberikan otonomi daerah diharapkan pengembangan dan pengelolaan daerah pesisir yang semula menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengembangan dan pengelolaan daerah pesisir yang menjadi wewenang pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja dalam mengelola pesisir dan lautnya (Dahuri, 2001).

Masyarakat pesisir merupakan salah satu pelaku usaha yang sampai sekarang ini di kategorikan sebagai kaum miskin dan memiliki banyak persoalan,

sehingga sangat jauh dari gambaran umum mengenai masyarakat sejahtera . Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulannya harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial ( Nikijuluw, 2001).

Kementerian kelautan dan perikanan (KKP) sejak tahun 2012 menyatakan bakal terus mendorong pengembangan sektor kelautan perikanan melalui proses industrialisasi merupakan upaya intervensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha perikanan supaya menjadi pemain industri nasional yang dapat bersaing di pasar internasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menjadi strategis, karena dengan adanya peningkatan nilai tambah dari suatu produk maka meningkatkan pula nilai jualnya. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan (PUMP P2HP) tahun 2012 – 2014 merupakan fasilitas bantuan pengembangan usaha bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam wadah Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) sebagai kelembagaan pelaksana PUMP P2HP. Tahun 2015 nama kegiatan dari PUMP P2HP berganti nama program menjadi Program Peningkatan Kapasitas Usaha Poklahsar dengan sasaran 1500 Poklahsar yang tersebar di 236 kabupaten/kota seluruh provinsi di Indonesia dengan total nilai sebesar 75 milyar (Dirjen Penguatan daya saing Produk Kelautan Perikanan, 2015).

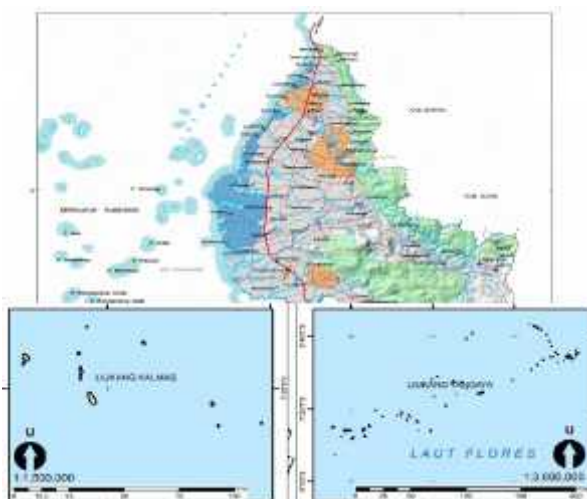
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki kekayaan alam yang cukup banyak dan sebahagian besar khususnya bidang kelautan dan perikanan. Secara Administrasi daerah ini memiliki 13 wilayah kecamatan yang meliputi 7 wilayah kecamatan daratan pesisir dan 2 wilayah kecamatan dataran tinggi serta 4 wilayah kecamatan kepulauan . Luas daerah ini secara keseluruhan yaitu 12.362,73 Km<sup>2</sup>, dengan rincian luas wilayah laut 11.464,44 km dan luas wilayah daratan 898,29 km<sup>2</sup>. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki panjang garis total garis pantai 106,14 km, dengan rincian panjang garis pantai daratan sekitar 42,57 km dan garis pantai pulau-pulau kecil sekitar 63,57 km. Wilayah ini memiliki 112 pulau 80 % berpenghuni, dengan jumlah penduduk di wilayah kepulauan sekitar 60.885 jiwa.

Di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang umumnya bermata pencaharian nelayan dan budidaya sangat memungkinkan adanya pengembangan usaha khususnya pengembangan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dengan demikian masyarakat pesisir khususnya para istri dari kelompok nelayan dan budidaya tersebut terpikirkan untuk membuat berbagai usaha pengolahan hasil perikanan dengan membuat kelompok pengolah dan pemasar. Dari kegiatan yang berkelompok dengan bimbingan dan pembinaan penyuluh perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka diajukanlah beberapa proposal sebagai persyaratan untuk

mendapatkan bantuan dari Dinas Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program Peningkatan Kapasitas Usaha Poklaksar dari Dirjen Penguatan Daya Saing merupakan salah satu program yang sangat membantu bagi kelompok pengolah dan pemasar yang ada di wilayah pesisir, bantuan hibah berupa peralatan pengolahan yang lengkap sesuai dengan bidang pengolahan sehingga mempermudah anggota kelompok dalam mengolah dan memproduksi hasil olahan, jumlah produksi semakin meningkat dan pemasaran semakin luas. (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016).

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) Bulan yakni pada Bulan Februari sampai Bulan Maret tahun 2018. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kuesioner,

komputer/ laptop, kamera, alat tulis menulis serta peralatan lainnya yang digunakan dan membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data primer diperoleh dari responden yaitu kelompok masyarakat penerima bantuan program Peningkatan Kapasitas Usaha Poklaksar, fasilitator Penyuluh Perikanan PNS/ Bantu dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan data Sekunder di peroleh dari statistik dan Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta laporan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan berbagai informasi lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : Observasi lapangan dengan melihat langsung aktifitas masyarakat pesisir, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan bantuan. Wawancara mendalam (Indepth interview). Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data individu cara pemanfaatan serta pandangan dari individu yang jadi responden, kemudian mendeskripsikan terhadap upaya pemberdayaan program bantuan Peningkatan Kapasitas Usaha Poklaksar terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari jurnal, baik dari

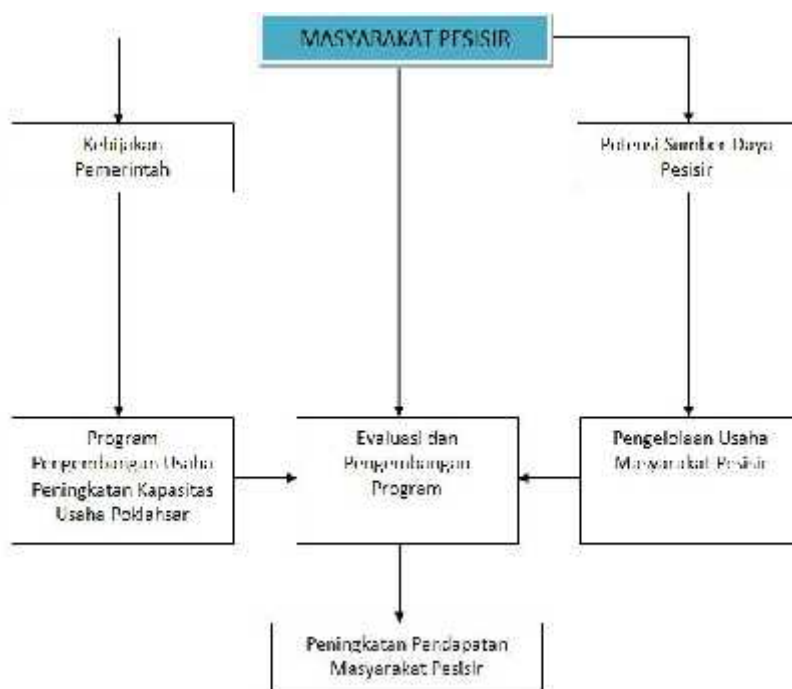
buku-buku, tulisan ilmiah, arsip dan lain sebagainya. Kuisisioner, yaitu dengan membagikan daftar pertanyaan kepada Responden untuk diberikan jawaban sebagai data penelitian.

Dalam penentuan responden, peneliti menggunakan teknik atau metode Cluster Random Sampling yaitu 50% dari kelompok pengolah yang menjadi responden mewakili beberapa kelompok Pengolah dan Pemasar. Keterwakilan responden dalam pengambilan sampel secara random yang bukan individual, dimana kelompok ini dibagi dalam kelompok penerima

bantuan dan kelompok belum menerima bantuan bagi kelompok pengolah dan pemasar yang ada di wilayah pesisir Kab. Pangkajene dan Kepulauan, yaitu Kecamatan Minasatene, Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri.

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep jumlah kelompok Pengolah dan Pemasar yang telah menerima Bantuan Program Peningkatan Kapasitas Usaha Poklaksar yang telah menerima bantuan Program Peningkatan Kapasitas Usaha Poklaksar adalah sebanyak 30 Kelompok.

Kerangka Fikir



Gambar 2. Kerangka Pikir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara Geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak diantara  $4^{\circ}40'$  LS -  $8^{\circ}00'$  LS dan diantara  $110^{\circ}$  BT -  $119^{\circ}48'67''$  BT. Luas

wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah  $1.112,29$  Km<sup>2</sup> yang terdiri dari  $848,14$  Km<sup>2</sup> wilayah perairan. Batas-batas administrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meliputi :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar (Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, serta Pulau Bali).

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 Kecamatan diantaranya 9 kecamatan daratan dan 4 kecamatan kepulauan. Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu terdiri dari : Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Minasa Te'ne dan Kecamatan Tondong Tallasa.

Di samping itu wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas. Kecamatan yang terletak di wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu : Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kecamatan Liukang Tangaya, dan Kecamatan Liukang Kalmas.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah yang mempunyai iklim tropis basah (Type B) dengan musim kemarau. Curah hujan di suatu wilayah dipengaruhi oleh iklim

geografis dan perputara/pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Pada tahun 2016, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember hingga Januari dengan curah hujan 581-991 Km<sup>3</sup>. Disamping itu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan yang terdiri dari daratan dan pegunungan. Dataran rendah seluas 73.721 Ha membentang dari garis pantai barat ke timur yang terdiri dari tambak, persawahan, rawa-rawa, dan empang. Daerah pegunungan berada pada ketinggian 100-1.000 m diatas permukaan laut, yang terletak disebelah timur dan merupakan wilayah yang banyak mengandung batu cadas, batu bara, serta berbagai jenis batu marmer. Temperatur udara berada pada kisaran 21°C – 31°C dengan rata-rata 26,4°C.

Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu wilayah pesisir tepatnya dibeberapa kecamatan yang ditandai dengan terdapatnya sumber daya berupa hasil perikanan yang dapat menambah kesejahteraan masyarakat khususnya dan pendapatan daerah pada umumnya.

Masyarakat pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada umumnya adalah nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan. Masyarakat yang mempunyai kegiatan

pengolahan hasil perikanan ini umumnya adalah istri-istri dari para nelayan dan pembudidaya yang memanfaatkan dan mengembangkan usaha pengolahannya yang berbahan dasar dari kegiatan

usaha yang digeluti oleh para suaminya. Adapun data produksi dari kegiatan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Data Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2013-2017

No	Nama Kelompok	Komoditas/ Pengolahan	Sebelum Mendapatkan Bantuan (Kg/Tahun)		Sesudah Mendapatkan Bantuan (Kg/Tahun)		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Khadijah	Bandeng Tanpa Duri	438	462	603	814	960
2	Melati	Abon Ikan	200	214	303	370	485
3	Diva	bandeng presto	240	244	333	357	471
4	Mandiri	Rempyek Udang	464	480	987	1.351	1.560
5	Mattoanging	Nugget Ikan	129	129	167	177	291
6	Melati	Kripik Rumput Laut	899	912	913	1.105	1.410
7	Cahaya	Abon Ikan	219	249	306	412	486
8	Sipadecengi	Kripik Rumput Laut	141	172	217	199	301
9	Teratai	Ikan kering/ Asin	2.920	3.010	3.127	3.492	3.900
10	Cahaya Desa	Kripik Bandeng	650	747	802	955	1.045
11	Agrofish 77	Bandeng Tanpa Duri	391	495	553	580	611
12	Sikamaseang	Abon ikan	126	151	178	182	336
13	Semangat Cambayya	Ikan kering/ Asin	3.606	4.271	4.490	4.630	5.040
14	Masengereng	Abon Ikan	194	227	334	445	506
15	Nurathirah	Bandeng Tanpa Duri	324	383	530	675	700

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pangkep 2017

Berdasarkan hasil koesioner responden bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan kelompok pengolah dan pemasar

wilayah pesisir di Kabupaten Pangkep dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu peranan pemerintah dan ekonomi, selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan

menggunakan skala likert kemudian dianalisis dengan analisis regresi berganda maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

Tabel 8. Analisis regresi berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2,169	1,206		-1,798	,100
1 Peranan Pemerintah	,258	,113	,944	2,278	,044
Ekonomi	,139	,057	,706	2,450	,032
Sosial Budaya	-,167	,109	-,749	-1,529	,154

Sumber : Data Primer Setelah diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut :

$$Y = -2,169 + 0,259X_1 + 0,139X_2 - 0,167X_3$$

Keterangan :

Y = Pendapatan

X<sub>1</sub> = Peranan Pemerintah

X<sub>2</sub> = Ekonomi

X<sub>3</sub> = Sosial Budaya

a = Konstanta

1, 2, 3 = Koefisien regresi

e = Standar error

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap terhadap pendapatan usaha kelompok pengolahan hasil perikanan. Adapaun penjelasan hasil uji t yaitu:

Pengaruh Peranan Pemerintah Terhadap Pendapatan Usaha Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel peranan pemerintah memiliki t hitung sebesar 2,278 > t tabel sebesar 2,2015 (sig. = 0,05 dan df = n-k, yaitu 15-4=11) dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,258 dan tingkat signifikansi 0,044 yang lebih kecil

dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan usaha kelompok pengolahan hasil perikanan.

Pengaruh Ekonomi Terhadap Pendapatan Usaha Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel ekonomi memiliki t hitung sebesar 2,450 > t tabel sebesar 2,2015 (sig. = 0,05 dan df = n-k, yaitu 15-4=11) dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,139 dan tingkat signifikansi 0,032 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan usaha kelompok pengolahan hasil perikanan.

Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pendapatan Usaha Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel sosial budaya memiliki t hitung sebesar -1,529 < t tabel sebesar 2,2015 (sig. = 0,05 dan df = n-k, yaitu 15-4=11) dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,167 dan



tingkat signifikansi -0,154 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sosial budaya tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha kelompok pengolahan hasil perikanan.

Berdasarkan data hasil produksi kelompok pengolah dan pemasar hasil

perikanan dari tahun 2013 – 2017 yang dijadikan sebagai perbandingan untuk melihat peningkatan pendapatan poklhasar dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :

Tabel 9. Data Produksi poklhasar tahun 2013-2017

No	Nama Kelompok	Komoditas/ Pengolahan	Sebelum Mendapatkan Bantuan (Kg/Tahun)		Sesudah Mendapatkan Bantuan (Kg/Tahun)		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Khadijah	Bandeng Tanpa Duri	438	462	603	814	960
2	Melati	Abon Ikan	200	214	303	370	485
3	Diva	bandeng presto	240	244	333	357	471
4	Mandiri	Rempeyek Udang	464	480	987	1.351	1.560
5	Mattoanging	Nugget Ikan	129	129	167	177	291
6	Melati	Kripik Rumput Laut	899	912	913	1.105	1.410
7	Cahaya	Abon Ikan	219	249	306	412	486
8	Sipadecengi	Kripik Rumput Laut	141	172	217	199	301
9	Teratai	Ikan kering/ Asin	2.920	3.010	3.127	3.492	3.900
10	Cahaya Desa	Kripik Bandeng	650	747	802	955	1.045
11	Agrofish 77	Bandeng Tanpa Duri	391	495	553	580	611
12	Sikamaseang	Abon ikan	126	151	178	182	336
13	Semangat Cambayya	Ikan kering/ Asin	3.606	4.271	4.490	4.630	5.040
14	Masengereng	Abon Ikan	194	227	334	445	506
15	Nurathirah	Bandeng Tanpa Duri	324	383	530	675	700

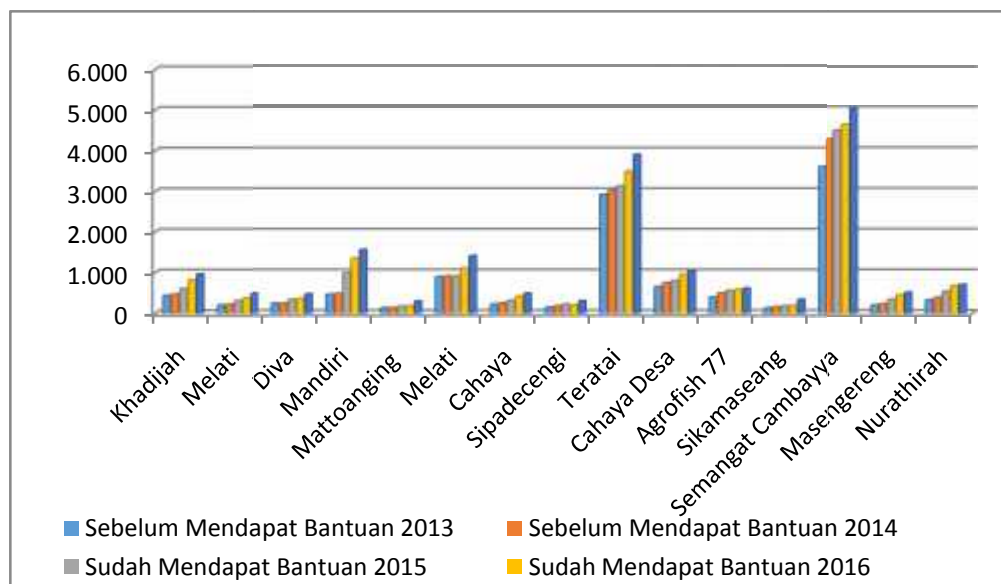
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pangkep 2017

Pendapatan poklhasar seperti yang disajikan pada tabel di atas dan

dijelaskan dalam bentuk grafik menunjukkan bahwa ke-15 poklhasar

yang telah mendapatkan bantuan mengalami peningkatan produksi, ini pertanda bahwa poklhasr tersebut juga mengalami peningkatan pendapatan. Dari data yang didapatkan menandakan bahwa bantuan pemerintah dalam program Peningkatan Kapasitas Usaha Poklhasr dari Dirjen Penguatan Daya

Saing Kelautan dan Perikanan sangat bermanfaat dan dapat membantu peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Pangkep. Adapun grafik peningkatan pendapatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3. Grafik Peningkatan Pendapatan Poklhasr 2013-2017

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat kami simpulkan beberapa hal antara lain :

Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Program Peningkatan Kapasitas Usaha Poklhasr dari Dirjen Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

pada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pendapatan rata-rata kelompok setelah menerima bantuan dari program Peningkatan Kapasitas Usaha Poklhasr mengalami peningkatan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan.

Dari kesimpulan di atas, maka adapun saran peneliti yaitu perlunya perhatian dari stakeholder dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah pada aspek sosial budaya ekonomi, teknologi, kelembagaan dan hukum untuk lebih meningkatkan tingkat

pengetahuan teknologi dan pendapatan masyarakat kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri.R. 2000. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan secara Berkelanjutan. Bogor.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, 2016. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2015. Pangkajene dan Kepulauan.
- Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 2015. Bantuan Untuk Kelompok Pengolah dan Pemaar Hasil Perikanan. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Jakarta.
- Nikijuluw, V.P.H. 2001. Potensi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Serta Pemberdayaan Pesisir Secara Terpadu. Institut Pertanian Bogor. Bogor.